



PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA




LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DIPA 01 (098849) UNAUDITED TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A

 Jalan Teratai No. 85, Sukajadi, Kota Pekanbaru

 www.pn-pekanbaru.go.id

 (0761) – 22573

 admin@pn-pekanbaru.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi dana Kantor Daerah Tingkat Satuan Kerja di bawah unit Eselon I Badan Urusan Administrasi pada Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Mahkamah Agung (Kantor Daerah/00501) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Mahkamah Agung (Kantor Daerah/00501). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 23 Februari 2026

Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sekretaris,



Ery Mardianto, S.T., S.H.

NIP. 19760301 200502 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	56

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku UAPPA (BA 00501) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pekanbaru, 23 Februari 2026
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Sekretaris,

Ery Mardianto, S.T., S.H.
NIP. 19760301 200502 1 001

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA/00501) Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.676.606 atau mencapai 98,47 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp25.061.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.179.078.075 atau mencapai 99,40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.246.891.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.588.293.074 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp52.509.491; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.535.783.583; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.476.524.423 dan Rp40.111.768.651.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.244.023, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20.666.262.665 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp20,642,018,642. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp20,642,018,642.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp42.763.035.034 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp20,642,018,642 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai -Rp266,942,236 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp18.257.694.495 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp40,111,768,651.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(UAPPA 00501/KD)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		%	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	25.061.000	24.676.606	98,5	46.456.036
JUMLAH PENDAPATAN		25.061.000	24.676.606	98,5	46.456.036
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	14.819.388.000	14.698.139.771	99,2	12.852.366.161
Belanja Barang	B.4	2.386.036.000	2.383.035.830	99,9	2.324.456.171
Belanja Modal	B.5	877.000.000	876.795.156	100,0	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		18.082.424.000	17.957.970.757	99,3	15.176.822.332

Pekanbaru, 23 Februari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran



Ety Mardianto, S.T., S.H,
 NIP. 19760301 200502 1 001

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(UAPPA 00501/KD)
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di muka (prepaid)	C.8	2.449.275	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	50.060.216	28.672.300
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		52.509.491	28.672.300
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	40.087.242.800	40.087.242.800
Peralatan dan Mesin	C.17	8.058.718.729	7.911.890.129
Gedung dan Bangunan	C.18	7.758.197.344	7.433.797.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	6.730.950	6.730.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	719.843.976	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(14.094.950.216)	(12.654.651.382)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.23	-	-
Jumlah Aset Tetap		42.535.783.583	42.785.009.497
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.24	-	-
Aset Lain-Lain	C.25	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.26	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.27	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		42.588.293.074	42.813.681.797

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(UAPPA 00501/KD)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	24.244.023	20.106.304
JUMLAH PENDAPATAN		24.244.023	20.106.304
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.091.796.484	12.859.573.161
Beban Persediaan	D.3	138.872.717	61.733.128
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.279.672.810	1.273.959.663
Beban Pemeliharaan	D.5	970.207.819	936.699.533
Beban Perjalanan	D.6	12.356.237	25.299.158
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.173.356.598	1.157.515.490
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		20.666.262.665	16.314.780.133
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.642.018.642)	(16.294.673.829)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	1.265.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	1.265.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	24.795.169
Pendapatan dari Keg. Non Operasional Lainnya		-	24.795.169
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	26.060.169
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(20.642.018.642)	(16.268.613.660)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(20.642.018.642)	(16.268.613.660)

Pekanbaru, 23 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Erny Mardianto, S.T., S.H,
NIP. 19760301 200502 1 001

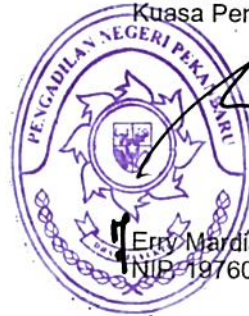
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(UAPPA 00501/KD)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	42.763.035.034	43.796.552.398
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	20.642.018.642	16.268.613.660
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	(266.942.236)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
SELISIH NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(266.942.236)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	18.257.694.495	15.235.096.296
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.651.266.383)	(1.033.517.364)
EKUITAS AKHIR	E.5	40.111.768.651	42.763.035.034

Pekanbaru, 23 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Erry Mardianto, S.T., S.H,
NIP. 19760301 200502 1 001

A. PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Pusat;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 12 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2017 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- 13 Surat Kepala KPPN Pekanbaru Nomor S-82/KPN.0401/2026 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) Tingkat UAKPA dan BLU di Lingkungan KPPN Pekanbaru.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis TA 2021 (UAPPA TA 2021)

Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Melalui peran Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) berkomitmen dengan visi:

"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku UAPPA BA 00501/KD melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Pengadilan Negeri Pekanbaru yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501) adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Pekanbaru (UAPPA 00501/KD) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25.061.000	24.676.606
Pendapatan Lain-Lain	-	-
-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL/Pendapatan Lain-Lain	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah Pendapatan	25.061.000	24.676.606
Belanja		
Belanja Pegawai	14.819.388.000	14.698.139.771
Belanja Barang	2.386.036.000	2.383.035.830
Belanja Modal	877.000.000	876.795.156
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	18.082.424.000	17.957.970.757

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.676.606 atau mencapai 98,47 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.061.000. Pendapatan di lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25.061.000	24.676.606	98,47
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
-	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL/Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	25.061.000	24.676.606	98,47

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 13,92% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar -100,00% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu yang disebabkan menurunnya Pendapatan Lain-Lain.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan	24.676.606	21.660.867	13,92
Pendapatan Lain-Lain	-	24.795.169	-100,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	24.676.606	46.456.036	-46,88

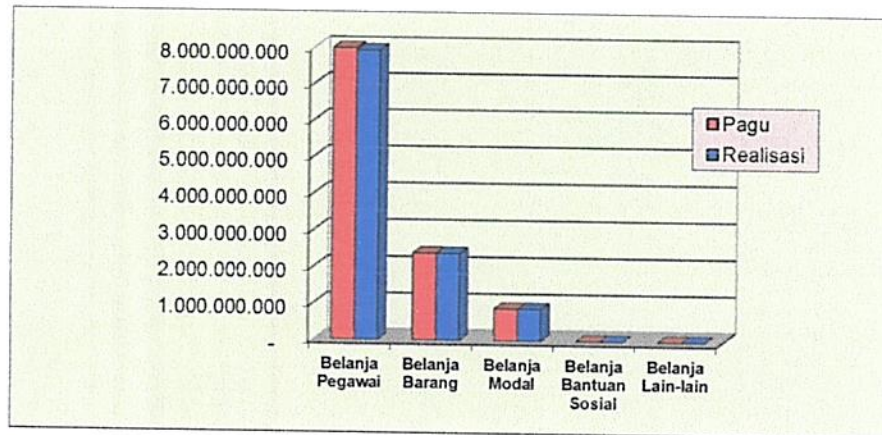
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp17.957.970.757 atau 99,31% dari anggaran belanja sebesar Rp18.082.424.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real
Belanja Pegawai	14.819.388.000	14.698.139.783	99,18
Belanja Barang	2.386.036.000	2.383.035.830	99,87
Belanja Modal	877.000.000	876.795.156	99,98
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	18.082.424.000	17.957.970.769	99,31
Pengembalian Belanja	-	12	-
Jumlah	18.082.424.000	17.957.970.757	99,31

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,32% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	14.698.139.771	12.852.366.161	14,36
Belanja Barang	2.383.035.830	2.324.456.171	2,52
Belanja Modal	876.795.156	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17.957.970.757	15.176.822.332	18,32

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.698.139.771 dan Rp12.852.366.161. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar -38,38 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	14.698.139.783	12.852.368.410	14,36
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	14.698.139.783	12.852.368.410	14,36
Pengembalian Belanja Pegawai	12	2.249	-99,47
Jumlah	14.698.139.771	12.852.366.161	14,36

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.383.035.830 dan Rp2.324.456.171. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan 2,52% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pengadaan barang/jasa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Perbandingan Belanja Barang

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.071.265.835	1.111.735.541	-3,64
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	16.800.000	-94,05
Belanja Barang Persediaan	183.176.012	107.261.613	70,77
Belanja Jasa	167.945.306	143.933.111	16,68
Belanja Pemeliharaan	947.292.440	919.426.748	3,03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.356.237	25.299.158	-51,16
Jumlah Belanja Kotor	2.383.035.830	2.324.456.171	2,52
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah	2.383.035.830	2.324.456.171	2,52

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp876.795.156 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh meningkatnya belanja aset penunjang tugas pokok dan fungsi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.828.600	-	-
Belanja Modal Gedung dan	729.966.556	-	-
Jumlah Belanja Kotor	876.795.156	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	876.795.156	-	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi dana untuk pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp146.828.600, mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang pelaksanaan tupoksi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.828.600	-	-
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	146.828.600	-	-
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	146.828.600	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp729.966.556 dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen yang berasal dari meningkatnya pengadaan gedung dan bangunan penunjang kegiatan tupoksi instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan	729.966.556	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	729.966.556	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	729.966.556	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan jaringan dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya alokasi pengadaan aset tetap lainnya/aset lainnya untuk penunjang pelaksanaan rencana strategis instansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 mengalami prosentase yang sama sebesar 0,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial misalnya rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Keterangan	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Debitur Per Satker	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-	-
Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Debitur Per Satker	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.449.275 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Pembayaran sewa web hosting	2.449.275	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	2.449.275	-

C.9 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima. Rincian Uang Muka Belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka Belanja

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
uang muka belanja pegawai	-	-
uang muka belanja barang	-	-
uang muka belanja modal	-	-
uang muka belanja bantuan sosial	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Pendapatan jasa pelatihan	-	-
Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp50.060.216 dan Rp28.672.300.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Barang Konsumsi	49.845.616	25.263.600
Bahan untuk Pemeliharaan	214.600	3.408.700
Jumlah	50.060.216	28.672.300

C.12 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 tersebut timbul disebabkan:

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Persediaan belum diterima dari SIMAKBMN (D)	-	-
Persediaan telah diterima dari SIMAKBMN namun belum terbukukan SP2D/SPHL-nya (K)	-	-
Jumlah	-	-

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur per Satker	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Debitur per Satker	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-	-
Jumlah	-	-

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah pada satker lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40.087.242.800 dan Rp40.087.242.800.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	40.087.242.800
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	40.087.242.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	40.087.242.800

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

C.17 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.058.718.729 dan Rp7.911.890.129. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	7.911.890.129
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	146.828.600
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2016	Rp	8.058.718.729
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	(7.311.198.051)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	747.520.678

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Pembelian	146.828.600	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Penghentian aset dari penggunaan	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.758.197.344 dan Rp7.433.797.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	7.433.797.000
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	729.966.556
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	(405.566.212)
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	7.758.197.344
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	(6.783.752.165)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	974.445.179

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Pembelian	729.966.556	KDP
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Revaluasi Aset (Kurang)	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.730.950 dan Rp6.730.950. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	6.730.950
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	6.730.950
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	6.730.950

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp719.843.976 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada satker lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	002/SP.Kons.Prc/PN. W4.U1/XI/2025	Rp 719.843.976	100%	CV. DHIYA CIPTA	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Jumlah		Rp 719.843.976			-

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.094.950.216 dan Rp12.654.651.382. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	8.058.718.729	7.311.198.051	747.520.678
Gedung dan Bangunan	7.758.197.344	6.783.752.165	974.445.179
Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	6.730.950	-	6.730.950
Akumulasi Penyusutan	15.823.647.023	14.094.950.216	1.728.696.807

C.23 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tetap yang Belum Diregister bisa timbul ketika tidak tercatatnya data BMN di aplikasi SIMAKBMN sehingga data keuangan dan data barang berbeda.

Rincian Aset Tetap yang Belum Diregister

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	-	-
Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

C.24 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Goodwill	-
Hak Cipta	-
Royalti	-
Paten	-
Software	-
Lisensi	-
Hasil Kajian / Penelitian	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-
Jumlah	-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Revaluasi Aset (Tambah)	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi Kurang		
Revaluasi Aset (Kurang)	Rp	-
Koreksi Kurang	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi amortisasi s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Termasuk Aset Lain-Lain antara lain Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional satker lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi Kurang		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
Penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Mutasi tambah:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-

Mutasi kurang:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-
2	-	-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.26 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Nilai Aset Lainnya yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya yang Belum Diregister seharusnya tidak boleh ada pada laporan keuangan tahunan.

Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 tersebut timbul disebabkan:

Jenis	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
Belum diterima dari SIMAKBMN	-	-
Telah diterima dari SIMAKBMN namun belum terbukukan SP2D/SPHL-nya	-	-
Jumlah	-	-

C.27 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Hak Cipta	-	-	-
Royalti	-	-	-
Software	-	-	-
Lisensi	-	-	-
Hasil Kajian / Penelitian	-	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.28 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

Uraian	Nilai
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	-
Jumlah	-

C.29 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.471.177.277 dan Rp45.732.200. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	2.438.524.713
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	32.652.564
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	-
4	Belanja Bantuan Sosial yang masih harus dibayar	-
5	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
6	Dana Pihak Ketiga	-
	Jumlah	2.471.177.277

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.347.146 dan Rp4.914.563. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	-
Instansi Pemerintah Lainnya	-	-
Badan Lainnya	-	-
Perorangan	5.347.146	Pendapatan sewa kantin dan dyk
Uraian	5.347.146	

C.31 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan antara lain utang yang belum diterima tagihannya. Rincian Utang yang Belum Ditagihkan disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang yang Belum Ditagihkan

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-
	Jumlah	-

C.32 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Langsung Belum Disahkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban entitas satker yang menerima hibah untuk mengajukan pengesahan kepada BUN pengelola hibah.

Rincian Hibah Langsung Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Jenis Hibah	Satker Penerima	Asal Hibah	Nilai Hibah
1	Uang	-	-	-
2	Barang	-	-	-
3	Jasa	-	-	-
	Jumlah			-

C.33 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bila pada akhir periode pelaporan terdapat kelebihan pembayaran pajak/PNBP, namun pengembalian pajak/PNBP tersebut belum direalisasikan, maka satuan kerja mencatatnya sebagai utang kelebihan bayar pajak/PNBP.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
	Jumlah	-

C.34 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Jangka Pendek Lain-lain	-
2	Utang Retensi	-
3	Utang Permintaan Persekot Gaji	-
4	Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu	-
5	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-
6	Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak	-
7	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	-
	Jumlah	-

C.35 Ekuitas

Saldo Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40.111.768.651 dan Rp42.763.035.034. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.244.023 dan Rp20.106.304. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	24.244.023	20.106.304	20,58
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	24.244.023	20.106.304	20,58

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp17.091.796.484 dan Rp12.859.573.161. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	17.091.796.484	12.859.573.161	32,91
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	17.091.796.484	12.859.573.161	32,91

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp138.872.717 dan Rp61.733.128. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	138.872.717	61.733.128	124,96
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	138.872.717	61.733.128	124,96

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.279.672.810 dan Rp1.273.959.663. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	1.279.672.810	1.273.959.663	0,45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	1.279.672.810	1.273.959.663	0,45

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp970.207.819 dan Rp936.699.533. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	546.379.600	505.642.239	8,06
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.912.840	413.784.509	-3,11
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22.915.379	17.272.785	32,67
-	-	-	-
Jumlah	970.207.819	936.699.533	3,58

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp12.356.237 dan Rp25.299.158. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	10.106.237	21.849.158	-53,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	3.450.000	-34,78
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	12.356.237	25.299.158	-51,16

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.173.356.598 dan Rp1.157.515.490. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	344.075.477	351.723.650	-2,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	829.281.121	805.791.840	2,92
-	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1.173.356.598	1.157.515.490	1,37
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.173.356.598	1.157.515.490	1,37

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Non Operasional			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.265.000	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	24.795.169	-100,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	-	26.060.169	-100,00
Beban Non Operasional			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Beban Non Operasional	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	26.060.169	-100,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Naik (Turun) %
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.763.035.034 dan Rp43.796.552.398.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus(Defisit) LO untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar -Rp20.642.018.642 dan -Rp16.268.613.660. Surplus(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Koreksi
	Jumlah	

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar -Rp266.942.236 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

No	Jenis Aset Tetap	Koreksi
1	Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	-266.942.236
2	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
	Jumlah	-266.942.236

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

No	Jenis Beban	Koreksi
1	Koreksi Beban	-
2	Koreksi Pendapatan	-
3	Koreksi Piutang	-
4	Koreksi Kewajiban	-
5	Koreksi Hibah	-
	Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.257.694.495 dan Rp15.235.096.296. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	17.957.970.757
2	Diterima dari Entitas Lain	- 24.676.606
3	Transfer Keluar	-
4	Transfer Masuk	-
5	Pengesahan Hibah Langsung	324.400.344
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	Jumlah	18.257.694.495

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 31 Desember 2025, DDEL sebesar - Rp24.676.606 sedangkan DKEL sebesar Rp17.957.970.757.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Persediaan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang merupakan transfer aset ke kantor daerah.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp324.400.344 dari total Rp324.400.344 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	Barang	Rp 324.400.344
2	-	-	-
3	-	-	-
Total Pengesahan			Rp 324.400.344
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			Rp 324.400.344

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.111.768.651 dan Rp42.763.035.034.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	Kuasa Pengguna Anggaran	Erry Mardianto, S.T., S.H.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Mella Iva Rifani, S.H.
	Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Yuni Elysabet, S.E., M.Si.
	Bendahara Pengeluaran	Lusiana Febriany, S.Kom.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 0900

RIAU

SATUAN KERJA : 098849

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tgl. Cetak 22/02/2026 11:06 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	25,263,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,408,700	0
0.0	131111	Tanah	40,087,242,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,911,890,129	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,433,797,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,730,950	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,967,122,574
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,687,528,808
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	44,868,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	864,200
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,914,563
0.0	391111	Ekuitas	0	42,763,035,034
JUMLAH			55,468,333,179	55,468,333,179

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tgl Data : 22/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 22/02/26 11:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	2,449,275	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	49,845,616	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	214,600	0
0.0	131111	Tanah	40,087,242,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,058,718,729	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,758,197,344	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,730,950	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	719,843,976	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,311,198,051
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,783,752,165
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,438,524,713
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	32,652,564
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	5,347,146
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,957,970,757
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,676,606	0
0.0	391111	Ekuitas	0	42,763,035,034
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	266,942,236	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	324,400,344
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,067,417
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,176,606
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,730,885,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	52,582	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	230,683,984	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	77,988,086	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	41,940,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	166,895,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	20,086,897	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	175,111,560	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	582,575,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,720,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	257,850,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,546,290,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,900,129,164	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7,041,659,503	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	180,114,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,520	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,720,840	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,230,208	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
 SATUAN KERJA : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tgl Data : 22/02/26 7:41 AM

Tgl Cetak : 22/02/26 11:03 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,063,360	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	48,136,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	11,660,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	977,410,835	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,729,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74,880,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	10,122,580	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	31,869,490	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,091,632	0
3.0	522141	Beban Sewa	163,568,473	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	440,014,600	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	106,365,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400,912,840	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,106,237	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	344,075,477	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	829,281,121	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	138,872,717	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22,915,379	0
JUMLAH			77,641,124,797	77,641,124,797

Keterangan :

FINAL

PEKANBARU, 22 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERRY MARDIANTO, ST, SH
 NIP 197603012005021001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU

SATUAN KERJA : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tgl Data : 22/02/26 12:48 AM

Tgl Cetak : 22/02/26 11:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,957,970,757
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,676,606	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,176,606
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,730,885,980	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52,594	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	230,683,984	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	77,988,086	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	41,940,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	166,895,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,086,897	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	175,111,560	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	627,443,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,720,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	257,850,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,546,290,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1,329,704,451	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,173,559,503	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	180,114,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,520	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,720,840	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,230,208	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,063,360	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	48,136,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,660,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	977,410,835	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,975,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,880,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	183,176,012	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,927,558	0
3.0	522141	Belanja Sewa	166,017,748	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	440,014,600	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	106,365,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400,912,840	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,106,237	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (098849) PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tgl Data : 22/02/26 12:48 AM

Tgl Cetak : 22/02/26 11:03 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146,828,600	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	729,966,556	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	12
JUMLAH			17,982,647,375	17,982,647,375

Keterangan :

FINAL

PEKANBARU, 22 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERRY MARDIANTO, ST, SH
197603012005021001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0900 RIAU
SATUAN KERJA : 098849 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 22/02/26 11:06 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				7=6/3
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	25,061,000	5,500,000	0	21.95
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	19,176,606	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi				
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	25,061,000	24,676,606	0	98.47
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	25,061,000	24,676,606	0	98.47
	JUMLAH PENDAPATAN	25,061,000	24,676,606	0	98.47

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0900
SATUAN KERJA : 098849
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
RIAU
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 22/02/26 11:05 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 22/2/26 8:28 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,705,903,000	3,730,886,000	3,730,885,980	0	3,730,885,980	100	20
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	45,000	53,000	52,594	12	52,582	99.21	418
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	370,593,000	270,593,000	230,683,984	0	230,683,984	85.25	39,909,016
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	86,149,000	86,149,000	77,988,086	0	77,988,086	90.53	8,160,914
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	41,940,000	41,940,000	0	41,940,000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,219,920,000	166,895,000	166,895,000	0	166,895,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	737,867,000	33,300,000	20,086,897	0	20,086,897	60.32	13,213,103
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	174,138,000	175,138,000	175,111,560	0	175,111,560	99.98	26,440
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	657,712,000	629,391,000	627,443,000	0	627,443,000	99.69	1,948,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	35,980,000	44,720,000	44,720,000	0	44,720,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	275,400,000	259,200,000	257,850,000	0	257,850,000	99.48	1,350,000
511157	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,242,500,000	2,546,290,000	2,546,290,000	0	2,546,290,000	100	0
511158	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	12,546,527,000	7,984,555,000	7,919,947,101	12	7,919,947,089	99.19	64,607,911
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	1,329,705,000	1,329,704,451	0	1,329,704,451	100	549
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	5,228,333,000	5,173,559,503	0	5,173,559,503	98.95	54,773,497
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	6,558,038,000	6,503,263,954	0	6,503,263,954	99.16	54,774,046
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	180,115,000	180,114,800	0	180,114,800	100	200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	4,000	3,520	0	3,520	88	480
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	14,721,000	14,720,840	0	14,720,840	100	160
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	5,231,000	5,230,208	0	5,230,208	99.98	792
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	15,064,000	15,063,360	0	15,063,360	100	640
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	50,000,000	48,136,000	0	48,136,000	96.27	1,864,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	11,660,000	11,660,000	0	11,660,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	276,795,000	274,928,728	0	274,928,728	99.33	1,866,272
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	12,546,527,000	14,819,388,000	14,698,139,783	12	14,698,139,771	99.18	121,248,229
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,164,329,000	977,440,000	977,410,835	0	977,410,835	100	29,165
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	18,975,000	18,975,000	0	18,975,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,880,000	74,880,000	74,880,000	0	74,880,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,400,000	10,000	0	0	0	0	10,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 ESELON I : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0900
 SATUAN KERJA : 098849
 JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 RIAU
 PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 22/02/26 11:05 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 22/2/26 8:28 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,276,609,000	1,071,305,000	1,071,265,835	0	1,071,265,835	100	39,165
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	144,105,000	183,220,000	183,176,012	0	183,176,012	99.98	43,988
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	144,105,000	183,220,000	183,176,012	0	183,176,012	99.98	43,988
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	2,420,000	1,927,558	0	1,927,558	79.65	492,442
522141	Belanja Sewa	217,100,000	166,080,000	166,017,748	0	166,017,748	99.96	62,252
522191	Belanja Jasa Lainnya	700,000	50,000	0	0	0	0	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	222,600,000	168,550,000	167,945,306	0	167,945,306	99.64	604,694
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	357,743,000	442,284,000	440,014,600	0	440,014,600	99.49	2,269,400
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	108,000,000	106,380,000	106,365,000	0	106,365,000	99.99	15,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	405,620,000	400,922,000	400,912,840	0	400,912,840	100	9,160
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	871,363,000	949,586,000	947,292,440	0	947,292,440	99.76	2,293,560
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,450,000	10,125,000	10,106,237	0	10,106,237	99.81	18,763
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	37,950,000	12,375,000	12,356,237	0	12,356,237	99.85	18,763
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,553,627,000	2,386,036,000	2,383,035,830	0	2,383,035,830	99.87	3,000,170
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,000,000	147,000,000	146,828,600	0	146,828,600	99.88	171,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	137,000,000	147,000,000	146,828,600	0	146,828,600	99.88	171,400
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	730,000,000	729,966,556	0	729,966,556	100	33,444
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	730,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	730,000,000	730,000,000	729,966,556	0	729,966,556	100	33,444
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	867,000,000	877,000,000	876,795,156	0	876,795,156	99.98	204,844
	JUMLAH BELANJA	15,967,154,000	18,082,424,000	17,957,970,769	12	17,957,970,757	99.31	124,453,243

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KODE UAKPB : 005.01.09.00.098849

Tanggal : 02/02/2026

Halaman : 1 dari 3

Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003		LOKASI KDP				
NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		Jalan Parit Indah				
NOMOR KDP : 1						
FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN						
CARA PEMBANGUNAN -						
No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	20-11-2025	- - 10.122.580	10.122.580	0	10.122.580	-
2	28-11-2025	- - 0	0	10.122.580	0	KDP MENJADI ASSET

PEKANBARU, 02 FEBRUARI 2026

PENANGGUNG JAWAB UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG

ERRY MARDIANTO, S.T., S.H.

NIP. 197603012005021001

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KODE UAKPB : 005.01.09.00.098849

Tanggal : 02/02/2026

Halaman : 2 dari 3

Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003 NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NOMOR KDP : 2 FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN CARA PEMBANGUNAN -	LOKASI KDP <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Jalan Parit Indah </div>
---	--

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
1	01-12-2025	- - 5.199.883	5.199.883	0	5.199.883	-
2	01-12-2025	- - 0	4.827.188	0	10.027.071	-
3	01-12-2025	- - 0	3.584.900	0	13.611.971	-
4	04-12-2025	- - 0	6.937.787	0	20.549.758	-
5	05-12-2025	- - 0	5.434.620	0	25.984.378	-
6	05-12-2025	- - 0	8.571.827	0	34.556.205	-
7	05-12-2025	- - 0	4.985.750	0	39.541.955	-
8	05-12-2025	- - 0	4.985.750	0	44.527.705	-
9	31-12-2025	- - 0	5.159.660	0	49.687.365	-
10	31-12-2025	- - 0	7.033.200	0	56.720.565	-
11	31-12-2025	- - 0	8.969.937	0	65.690.502	-

KARTU KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KODE UAKPB : 005.01.09.00.098849

Tanggal : 02/02/2026

Halaman : 3 dari 3

Kode Lap : K-KDP

KODE KDP : 7010101003 NAMA KDP : Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NOMOR KDP : 2 FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN CARA PEMBANGUNAN -	LOKASI KDP <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 50px;"> Jalan Parit Indah </div>
---	---

No.	Tgl Buku	No. Kontrak Nama Kontraktor Nilai Kontrak	Mutasi		Saldo KDP	Keterangan
			Tambah	Kurang		
12	31-12-2025	- - 0	7.178.550	0	72.869.052	-
13	31-12-2025	- - 0	335.326	0	73.204.378	-
14	31-12-2025	- - 0	335.327	0	73.539.705	-
15	31-12-2025	002/SP.Kons.Prc/PN.W4.U1/XI /2025 CV DHIYA CIPTA 646.304.271	646.304.271	0	719.843.976	-

PEKANBARU, 02 FEBRUARI 2026
 PENANGGUNG JAWAB UAKPB
 KUASA PENGGUNA BARANG

ERRY MARDIANTO, S.T., S.H.
 NIP. 197603012005021001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14350/SEK/PL1.2.4/VIII/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Persetujuan Hibah pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru

Jakarta, 1 Agustus 2025

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 315, Kota Pekanbaru, Riau

Sehubungan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau Nomor 529/SEK.PT.W4-U/PL1.2.4/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Permohonan Persetujuan Penerimaan Hibah Barang pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Telaah Tim Kerja Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Nomor 190/BUA.1/PL.1.2.4/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan hibah sebagaimana terlampir dapat kami setujui;
2. Melakukan penerimaan hibah berdasarkan surat persetujuan yang telah ditetapkan;
3. Memastikan bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPH) memuat detail objek hibah dan jangka waktu penyelesaian hibah;
4. Melakukan pengesahan hibah paling lambat 2 bulan sejak surat persetujuan ini ditetapkan;
5. Memastikan bahwa penerimaan hibah tidak mengakibatkan terjadinya duplikasi pengeluaran anggaran;
6. Melaporkan penatausahaan hibah kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku pengguna anggaran melalui aplikasi e-IPLANS pada menu "HIBAH - MONEV".

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Perlengkapan;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
6. *Large Institutional Funding Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
7. Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W DIPA 01 Wilayah Riau.



LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Nomor : 14350/SEK/PL1.2.4/VIII/2025

Tanggal : 1 Agustus 2025

DAFTAR BARANG

Hibah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kode Barang	Uraian Barang	Volume	Satuan	Estimasi Harga Satuan	Jumlah
6070301001	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi				
	- Renovasi Ruang Ketua	1	Unit	47.628.331	47.628.331
	- Renovasi Ruang Wakil Ketua	1	Unit	19.746.900	19.746.900
	- Renovasi Ruang Tunggu Pimpinan	1	Unit	53.342.755	53.342.755
	- Renovasi Ruang tunggu Sidang	1	Unit	56.061.682	56.061.682
	- Partisi Pembatas Pengujung	1	Unit	114.789.096	114.789.096
	- Renovasi Rumah Dinas Ketua	1	Unit	32.831.580	32.831.580
Estimasi Total Nilai Perolehan					324.400.344

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

